



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 19
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 29 September 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.10 WIB s.d 15.10 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Sinkronisasi dan penajaman terhadap usulan, masukan serta saran Komisi V DPR RI dalam penyusunan RKA K/L RAPBN TA 2022
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, S.H
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, sekjen Kementerian Perhubungan dan Sekjen Kementerian Desa PDT & Transmigrasi beserta jajaran

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, sekjen Kementerian Perhubungan dan Sekjen Kementerian Desa PDT pada hari ini adalah Sinkronisasi dan penajaman terhadap usulan, masukan serta saran Komisi V DPR RI dalam penyusunan RKA K/L RAPBN TA 2022
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, sekjen Kementerian Perhubungan dan Sekjen Kementerian Desa PDT untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sekjen Kementerian PUPR, Sekjen Kementerian Perhubungan dan Sekjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tentang sinkronisasi dan penajaman terhadap usulan, saran, dan masukan Komisi V DPR RI dalam RKA-K/L APBN TA 2022.
2. Sebagai bahan untuk melakukan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI sepakat dengan Sekjen Kementerian PUPR, Sekjen Kementerian Perhubungan dan Sekjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar menyerahkan kepada Komisi V DPR RI bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 14 hari kerja setelah Undang-undang tentang APBN ditetapkan dalam rapat paripurna.
3. Komisi V DPR RI memahami perubahan pagu anggaran Kementerian PUPR dalam APBN TA 2022 sebagai berikut:

Dalam ribu rupiah

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ UNIT KERJA/ PROGRAM	PAGU KEBUTUHAN TA 2022	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2022	SELISIH
		A	B	A-B
	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	176.680.751.500	100.597.698.915	76.083.052.585
a.	Sekretariat Jenderal	944.809.128	591.771.000	353.038.128
b.	Inspektorat Jenderal	101.700.000	101.700.000	0
c.	Ditjen Bina Marga	68.099.860.560	39.700.014.651	28.399.845.909
d.	Ditjen Cipta Karya	27.592.993.567	12.510.140.000	15.082.853.567
e.	Ditjen Sumber Daya Air	62.028.253.200	41.233.678.026	20.794.575.174
f.	Ditjen Perumahan	15.996.357.367	5.100.000.000	10.896.357.367
g.	Ditjen Bina Konstruksi	750.949.783	600.000.000	150.949.783

h. Badan Pengembangan /Hal.3

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ UNIT KERJA/ PROGRAM	PAGU KEBUTUHAN TA 2022	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2022	SELISIH
		A	B	A-B
h.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	294.819.140	212.833.488	81.985.652
i.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	566.235.703	350.000.000	216.235.703
j.	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	304.773.052	197.561.750	107.211.302

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB.

Jakarta, 29 September 2021

KETUA RAPAT,



LASARUS

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA PDT DAN
TRANSMIGRASI,



TAUFIK MADJID

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PUPR,



MOHAMMAD ZAINAL FATAH

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



DJOKO SASONO